

KHILAFAH PERSPEKTIF AHMADIYAH: STUDI JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA DI GONDRONG, TANGERANG, BANTEN

Ahmad Suhendra
STAI Asy-Syukriyah Tangerang
asra.boy@gmail.com

Abstrak

Khilafah Islamiyah merupakan konsep pemerintahan yang pada akhir-akhir ini kembali mengemuka dan menjadi tuntutan sebagian umat Islam. Pasca reformasi, tepatnya tahun 2000-an, Hizbut Tahrir di Indonesia mengadakan seminar khilafah pertama kali. Setelah itu, mereka sangat gencar menggaungkan khilafah sebagai sistem negara ideal. Mereka sering melakukan kritik terhadap sistem demokrasi yang dianggapnya sebagai produk Barat. Isu khilafah kembali mencuat setelah gerakan yang menamakan dirinya *Islamic State of Iraq and Syam* (ISIS) yang mendeklarasikan Umar Al-Baghdadi sebagai khalifah. Model yang disebutkan terakhir ini bahkan melayangkan aksi-aksi kekerasan. Jauh sebelum keduanya menggelorakan khilafah di tengah negara modern, Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sudah menerapkannya. JAI menerapkan khilafah jauh sebelum Ikhwanul Muslimun mewacanakan sistem pemerintahan Islam tersebut. Sebab itu konsep dan sisten khilafah yang diterapkan Ahmadiyah menjadi menarik untuk diteliti. Masalah yang akan dijawab dalam artikel ini adalah bagaimana JAI di Kampung Gondrong menafsirkan dan mengimplementasikan *Khilafah ala Minhaji an-Nubuwwah* dalam konteks keindonesiaan? Dan mengapa khilafah ala Ahmadiyah dapat berjalan beriringan dengan sistem politik negara-negara, khususnya dengan sistem negara di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan itu maka dilakukan observasi partisipatif dan wawancara.

Kata Kunci: *Nation State*, *NKRI*, Khilafah, JAI, Spiritual (Rohani)

A. Sekapur Sirih

“Al-Masihil Mau'ud telah menaburkan benih. Benih yang diberkahi tersebut telah ditakdirkan untuk menjadi sebuah pohon besar yang sarat dengan buah-buah yang berlimpah. Ingatlah bahwa kemajuan masa depan akan tergantung pada khilafat.”

Hadhrat Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad (1921)

Kutipan di atas menggambarkan substansi khilafah Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)¹ di seluruh dunia, baik secara doktrin maupun organisasi. Terlepas dari penerapan khilafah di masa Nabi, penggunaan istilah itu menjadi isu yang sensitif dalam konteks kekinian. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, upaya merubah ideologi pada Khilafah sudah ada. Dari yang sifatnya konstituante hingga pemberontakan yang dilakukan beberapa kalangan 'islamis'. Seperti gerakan DI/TII yang dikomandoi oleh Kartosuwiryo. Kemudian gerakan Negara Islam Indonesia (NII) yang merupakan metamorfosis dari DI/TII pada 1970-an. Jaringan ini yang kelak akan bermetamorfosis menjadi Jama'ah Islamiyah (JI).²

Beberapa dekade terakhir, istilah khilafah banyak dimainkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Organisasi ini didirikan di Jerusalem Timur tahun 1952 dengan nama Hizbut Tahrir (HT). Dan baru-baru ini juga digaungkan oleh *Islamic State of Iraq and Sham* (ISIS) yang menguasai beberapa negara di Timur Tengah. Namun dua puluh tahun sebelum Ikhwanul Muslimun menggelorakan Khilafah, JAI sudah menerapkannya. Khilafah membawa JAI pada ruang kemajuan, sehingga dapat tersebar lebih dari 204 negara di dunia.

Kehidupan beragama di Indonesia sekarang ini ditandai dengan fenomena yang agak merisaukan. Di satu pihak terjadi gelombang Islamisasi luar biasa yang ditandai dengan adanya formalisasi syariat Islam di sejumlah daerah, dan di pihak lain terjadi gelombang penyesatan satu aliran keagamaan atas aliran dan ekspresi keagamaan yang lain.³ Itu terbukti dari tragedi sekitar sepuluh tahun silam, tepatnya 15 Juni 2005, JAI Parung Bogor mengalami penyerbuan, bahkan memakan korban jiwa. Pasca tragedi Parung, nama Ahmadiyah mulai ramai diperbincangkan dikhalayak publik, sehingga banyak orang yang penasaran terhadap organisasi yang mulanya didirikan di India tersebut.

¹Ahmadiyah ini menunjukkan sebuah nama organisasi yang sering digunakan dalam karya akademik maupun surat kabar di Indonesia. Adapun istilah Jemaat tidak banyak digunakan dalam karya akademik. Apabila keduanya digabung, Jemaat Ahmadiyah Indonesia, maka itu menunjukkan pada Ahmadiyah Qadian. Lihat, Mochamad Sodik, "Mengenal Jemaat Ahmadiyah Lebih Dekat: Teks, Konteks dan Pengalaman Lapangan" *Bahan Diskusi Short Research dan Seminar Hasil Penelitian*, ISAI's UIN Sunan Kalijaga, 17 Mei 2015 (tidak dipublikasikan), hlm. 1.

²Noorhaidi Hasan, "Kata Pengantar: Jalan Menuju Demokrasi" dalam Ainur Rofiq al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbuttahrir di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2012), hlm. ix-x.

³Rumadi, "Prolog Mengawal Pluralisme di Tengah Kegamangan Negara," dalam Rumadi dan Ahmad Suaedy (ed.), *Politisasi Agama dan Konflik Komunal: Beberapa Isu Penting di Indonesia* (Jakarta: The Wahid Institute, 2007), hlm. 2

JAI masuk ke Indonesia sekitar tahun 1920-an oleh Muhamad Ali atau Rahmat Ali di Tapaktuan Aceh. Eksistensi JAI di dunia sebagai sebuah organisasi keagamaan telah menggunakan sistem khilafah selama lebih dari 100 tahun. *Khilafah ala Minhaj an-Nubuwwah* telah memunculkan JAI sebagai organisasi yang solid dan terus berkembang hingga memiliki lebih dari 200 juta anggota. Walaupun di Indonesia mereka termasuk golongan minoritas.

Sebab itu penelitian tentang khilafah masih sangat relevan untuk diangkat. Apalagi kekhilafahan sudah berjalan di berbagai negara di mana JAI itu berada. Penelitian ini menitikberatkan pada beberapa masalah berikut. *Pertama*, bagaimana JAI di Kampung Gondrong menafsirkan dan mengimplementasikan *Khilafah ala Minhaji an-Nubuwwah* dalam konteks keindonesiaan? Dan mengapa khilafah ala JAI dapat berjalan beriringan dengan sistem politik di berbagai negara, khususnya dengan sistem negara di Indonesia?

Untuk menjawab masalah tersebut, penulis terjun langsung ke JAI yang berada di Kampung Gondrong, Tangerang, Provinsi Banten. Di sana penulis melakukan pengamatan dan analisis terkait keseharian masyarakat setempat. Selain itu, untuk memperoleh data penulis juga melakukan wawancara (interview) dengan beberapa tokoh dan masyarakat setempat, baik dari kalangan JAI maupun *ghair* JAI.⁴ Adapun tokoh yang diwawancarai dalam melakukan penggalan data adalah Nanang Sanusi,⁵ Margani,⁶ Romdoni⁷ dan Jamhuri⁸. Beberapa literatur dari kalangan JAI juga digunakan untuk melengkapi data dalam tulisan ini.

Adapun penelitian sebelumnya yang relevan adalah *Skripsi* karya Ahmad Hudori dengan judul “Khilafah Islamiyah Perspektif Ahmadiyah”. Hudori meneliti Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) atau Ahmadiyah

⁴Istilah *Ghair* sering terlontar saat melakukan wawancara untuk menunjukkan kepada masyarakat di luar JAI atau non Ahmadiyah. Ada yang menyebutkan dengan kata “*ghair* ahmadi”, tetapi ada juga yang menyebutkan “*ghair* ahmadiyah”.

⁵Pria bernama lengkap Nanang Sanusi ini merupakan Muballigh Wilayah. Sanusi membawahi sepuluh cabang yang ada di Tangerang. Pria yang lahir di Banten 9 September 1957 ini memiliki Istri bernama Mira Suraya Basalamah, dan beliau sudah dikaruniai 5 orang anak serta 8 cucu.

⁶Ketua Cabang JAI Gondrong ini memiliki nama lengkap Margani. Beliau asli sebagai warga pribumi yang lahir pada 10 November 1966. Istri beliau bernama Lina, dan telah dikaruniai 5 orang anak.

⁷Pria yang tinggal Cipondoh tiga belas tahun silam ini memiliki nama lengkap Romdoni. Lahir pada 2 Januari 1977. Beliau merupakan warga biasa yang non-JAI.

⁸Pria kelahiran Gondrong ini bernama Jamhuri. Beliau sebagai sekretaris RW setempat yang Non JAI.

Lahore terkait relasi Islam dan politik.⁹“Gerakan Khilafat di India Tahun 1919-1924” karya Agus Cahyo Nugroho yang meneliti tentang gerakan khilafah yang mengusung *Pan Islamism* di India. Agus menyoroti sejarah pergolakan khilafah di India dan implikasi terhadap Islam di India.¹⁰ Karya Aksin Wijaya berjudul “Negara Islam Indonesia? (Menguji Otentisitas Argumen Hukum Khilafah Islamiah dalam Konteks Berislam Indonesia)” yang mengulas tentang konsep bernegara dan khilafah yang dijalankan pada masa Nabi dan Empat Sahabat setelah beliau.¹¹ Karya lainnya adalah buku berjudul *Khilafah vis-a-vis Nation State* karya Saifuddin. Saifuddin menguraikan khilafah dalam al-Qur’an dan pandangan para ulama. Khilafah secara historis dari masa Nabi sampai Dinasti Usmaniah juga tidak luput dibahas. Namun *stressing* tulisan ini adalah konsep khilafah yang ditawarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).¹² Adapun tulisan ini menitikberatkan pada relasi khilafah JAI terhadap konsep *nation state*. JAI yang diteliti adalah masyarakat JAI Gondrong Cipondoh Tangerang Banten.

B. Khilafah Sebagai Lembaga Non Ilahiah

Khilafah¹³ merupakan istilah yang menunjukkan pada kekuasaan tertinggi dalam masyarakat Muslim yang menggantikan atau melanjutkan tugas-tugas Nabi Muhammad saw sebagai pemimpin agama dan kepala pemerintahan. Sebab itu, kepala negara dalam pemerintahan dan kerajaan Islam di masa lalu disebut *khalīfah*.¹⁴ Khilafah menurut Ibn Khaldun adalah kepemimpinan sesuai dengan tuntutan syari’at untuk kemaslahatan dunia dan akhirat mereka. Adapun menurut Rasyid Rida, khilafah, imamah, imarah

⁹Ahmad Hudori, “Khilafah Islamiyah Perspektif Ahmadiyah”, *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2009 (tidak dipublikasikan).

¹⁰Agus Cahyo Nugroho, “Gerakan Khilafat di India Tahun 1919-1924”, *Skripsi* Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008 (tidak dipublikasikan).

¹¹Aksin Wijaya, “Negara Islam Indonesia? (Menguji Otentisitas Argumen Hukum Khilafah Islamiah dalam Konteks Berislam Indonesia)”, *Conference Proceedings Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XII)* IAIN Sunan Ampel Surabaya 2008 (tidak dipublikasikan).

¹²Saifuddin, *Khilafah vis-a-vis Nation State Telaah atas Pemikiran Politik HTI* (Yogyakarta: Mahameru, 2012).

¹³Khilafah adalah kata serapan dari bahasa Arab yang berbunyi “*khalīfah*”. Al-Qur’an menyebutkan kata *khalīfah* dalam berbagai bentuk. Pertama, dalam bentuk *khlīfah* (tunggal) terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 30 dan Şād ayat 26. Kedua, bentuk *jama* (plural) dengan kata *khalāif* dan khulafā’ yang terdapat dalam surat al-An’am ayat 165, Yūnus ayat 14 & 73, Fāṭir ayat 39, al-A’rāf ayat 68 & 73 dan al-Naml ayat 62.

¹⁴Inayah Rochmaniyah, “Imamah-Khilafah” dalam M. Nur Kholis Setiawan dan Djaka Soetapa (ed.), *Meniti Kalam Kerukunan: Beberapa Istilah Kunci dalam Islam dan Kristen* (Jakarta: Gunung Mulia, 2010), hlm. 111.

adalah tiga kalimat yang bermakna satu, yaitu kepemimpinan negara Islam yang meliputi kemaslahatan dunia dan akhirat.¹⁵

Setelah khulafa ar-rasyidun, lembaga khilafah dalam sejarah politik Islam terus berlanjut dengan munculnya Dinasti Umayyah di Spanyol (756-1031 M), Dinasti Fatimiyah di Mesir (909-1171 M), Dinasti Utsmaniyah di Turki (1299-1924 M), Dinasti Syafawi di Iran (1501-1722 M) dan Dinasti Moghul di India (1526-1858 M). Khilafah ini berakhir sejak Mustafa Kemal Attaturk menghapuskannya pada 3 Maret 1924. Dalam sejarahnya, pasca pelarangan itu muncul upaya untuk menghidupkan kembali lembaga khilafah di dunia Islam.¹⁶

Pada awal keberadaannya, para pemimpin Islam menyebut diri mereka *khalifah rasul Allah* (pengganti Nabi Allah). pada perkembangannya beberapa pemimpin Muslim memilih untuk menyebut dirinya *khalifah Allah* atau *khalifahsaja*.¹⁷ Istilah khalifah (khilafah) mengalami perkembangan seiring dengan pergolakan politik saat itu. Menurut kalangan Sunni khalifah sebagai pemimpin politik masyarakat Islam harus dipilih oleh kaum muslim atau perwakilan umat Islam. Kekhalifahan merupakan sebuah lembaga yang non-ilahiah, tidak berdasarkan pewahyuan, yang melanjutkan institusi kenabian. Dengan demikian, khalifah tidak dipilih berdasarkan wahyu atau pewahyuan, tetapi berdasarkan kesepakatan atau konsensus secara demokratis.¹⁸ Adapun kalangan Syi'ah memiliki doktrin sendiri terkait khilafah. Khilafah dipahami sebagai sebuah lembaga yang bersifat ketuhanan (*ilahiyah*) yang menggantikan lembaga kenabian. Khilafah terkait dengan doktrin agama, spiritual dan politik.¹⁹

¹⁵Baca Saifuddin, *Khilafah vis-a-vis Nation State Telaah atas Pemikiran Politik HTI* (Yogyakarta: Mahameru, 2012), hlm. 17.

¹⁶ Baca Inayah Rochmaniyah, "Imamah-Khilafah" dalam M. Nur Kholis Setiawan dan Djaka Soetapa (ed.), *Meniti Kalam Kerukunan*, hlm. 123.

¹⁷Inayah Rochmaniyah, "Imamah-Khilafah" dalam M. Nur Kholis Setiawan dan Djaka Soetapa (ed.), *Meniti Kalam Kerukunan*, hlm. 112.

¹⁸Seorang imam terutama adalah seorang pemimpin politik yang bertugas mengatur sosial-politik. Persyaratan mendasar yang harus dimiliki seorang pemimpin politik yang disebut dengan khalifah adalah memiliki sifat adil. Sebab itu, siapa saja yang memenuhi kriteria tersebut dapat mengajukan diri sebagai calon imam. Baca Inayah Rochmaniyah, "Imamah-Khilafah" dalam M. Nur Kholis Setiawan dan Djaka Soetapa (ed.), *Meniti Kalam Kerukunan* hlm. 119-120.

¹⁹Berbeda dengan sunni, Syiah memandang imam lebih tinggi daripada khalifah karena seorang imam bukan sekadar khalifah yang berperan menggantikan kepemimpinan politik setelah wafatnya Nabi saw, melainkan juga para pemberi syafa'at, perantara menuju Allah, pendamping al-Qur'an, penjaga agama, pintu menuju Allah, pilar kehidupan di bumi dan tidak dapat dibandingkan dengan manusia biasa. Sebab itu, Imam dipilih bukan dari proses pengakuan atau kesepakatan publik, melainkan karena kedudukan spiritualnya dan kualitas jiwanya yang sempurna.

Kalangan JAI berpandangan bahwa pemimpin tunggal dalam masyarakat muslim adalah Mirza Ghulam Ahmad. Setelah Mirza Ghulam Ahmad meninggal pada tahun 1908, kepemimpinan di Ahmadiyah digantikan Hakim Maulana Nuruddin sebagai *Khalifatul Masih I*. Dan doktrin *khalifa al-masih* didasarkan pada wasiat Mirza Ghulam Ahmad.²⁰ Wafatnya Mirza Ghulam itu yang menandai sistem kekhalifahan mulai dijalankan JAI. Di dalam bukunya yang berjudul *Ajaranku*, Mirza Ghulam Ahmad menyatakan, akulah al-Masih yang dijanjikan itu dan tidak ada lagi yang lain. Barangsiapa yang baiat kepadaku dengan sesungguhnya-sungguhnya dan menjadi pengikutku dengan hati setulus-tulusnya dan juga membuat dirina mabuk di dalam ketaatan kepadaku hingga meninggalkan segala keinginan-keinginan pribadinya, rohku akan memberikan syafaat pada hari-hari yang penuh derita.²¹

Ada beberapa dalil yang digunakan JAI sebagai basis penerapan khilafah, baik dari al-Qur'an maupun hadis. Adapun ayat al-Qur'an yang sering dijadikan landasan khilafah salah satunya adalah surat an-Nur ayat 56 (Versi JAI).

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا
اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ
خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۗ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْفَاسِقُونَ

Artinya:

Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan

Kalangan syiah lebih sering menggunakan istilah imam dibanding dengan khalifah. Khalifah (imam) dipilih berdasarkan wahyu sebagaimana para nabi. Baca Inayah Rochmaniyah, "Imamah-Khilafah" dalam M. Nur Kholis Setiawan dan Djaka Soetapa (ed.), *Meniti Kalam Kerukunan*, hlm. 120-121.

²⁰Iskandar Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2005) hlm. 120. Bandingkan dengan, Inayah Rochmaniyah, "Imamah-Khilafah" dalam M. Nur Kholis Setiawan dan Djaka Soetapa (ed.), *Meniti Kalam Kerukunan*, hlm. 122-123.

²¹Baca Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, *Ajaranku* (Parung: Jemaat Ahmadiyah Indonesia: 2002), hlm. 12.

tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. dan Barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik. (QS. an-Nur: 55)

M. Ahmad Cheema mengartikan ayat di atas bahwa Islam akan mendapat kekuatan dan kemenangan melalui para khalifah. Dan zaman sekarang ini hanya Mirza Ghulam Ahmad yang berdasarkan wahyu dari Allah swt. Ayat ini juga hanya berlaku bagi imam mahdi, yakni Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad serta bagi murid-murid beliau yang mengaku bahwa khilafat masih terus berjalan dalam agama Islam.²² Dalam beberapa literatur JAI menulis ayat ini adalah ayat 56, seperti dalam makalah Abdul Rozzaq yang berjudul “Khilafat Islam Tinjauan Aspek Nubuwatan dan Manifestasinya” halaman sampul. Kemudian dalam buku Ahmad Cheema yang berjudul Khilafat telah Berdiri di halaman 3. Dari dua literatur itu ditulis surat an-Nur ayat 56, padahal ayat 56 itu berbunyi: wa aqīmu aṣ-ṣalāta wa ātu az-zakāta wa aṭī’u ar-rasūla la’allahum turhamūn. Ayat 56 tidak menjelaskan tentang khilafah, justru yang menjelaskan tentang khilafah itu ayat sebelumnya.

Menurut Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad, perkataan khalifah dalam al-Qur’an digunakan dalam tiga pengertian. *Pertama*, khalifah digunakan untuk nabi yang seakan-akan menjadi pengganti Allah di dunia, sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 31-32 dan surat Ṣad ayat 27. *Kedua*, khalifah diartikan sebagai kaum yang datang kemudian, seperti dalam surat al-A’rāf ayat 70 dan 75. Khalifah dalam kategori ini diartikan sebagai para pengganti Nabi yang dipilih oleh kaumnya sendiri. *Ketiga*, dipergunakan untuk para pengganti nabi karena mereka mengikuti jejak para nabi sebelum mereka. Khalifah-khalifah semacam ini dapat diangkat oleh Tuhan sebagaimana seorang Nabi yang diangkat Tuhan. Khalifah yang berpangkat nabi ini adalah pembantu bagi nabi yang ada sebelumnya atau pada masanya, seperti Nabi Harun yang menjadi khalifah bagi Nabi Musa (surat al-A’raf: 143). Pada intinya, semua khalifah dalam arti pertama dan ketiga hanyalah pemimpin rohani.²³ Nanang Sanusi memberikan contoh Nabi Adam yang dijelaskan dalam surat al-Baqarah dan Nabi Dawud dalam surat al-A’rāf menunjukkan bahwa khalifah juga sebagai Nabi. Pengertian khalifah dalam kategori ketiga adalah kaum sebagai pengganti atau wakil Nabi.²⁴

²²M. Ahmad Cheema, *Khilafat Telah Berdiri* (Ttp: Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 1995), hlm. 4.

²³Iskandar Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah*, hlm. 119.

²⁴Hasil wawancara dengan Bapak Nanang Sanusi, 22 Mei 2015, di kediamannya.

Dengan demikian, khilafah menurut Ahmadiyah adalah kepemimpinan sebagai pengganti untuk mengatur kehidupan suatu umat.²⁵ Kepemimpinan yang dimaksud adalah kepemimpinan spiritual (rohani). Nanang Sanusi yang merupakan Mubaligh Wilayah JAI menjelaskan, khilafah dalam JAI itu bermakna sebagai pimpinan rohani (spiritual). Jadi yang dibangun sistem khilafah JAI adalah rohani bukan status sebagai pimpinan politik yang berorientasi pada kekuasaan. Karena khalifah itu representasi dari kepemimpinan dalam Islam.²⁶ Khilafat adalah satu nizam rohani yang hak-hak kekuasaannya adalah dari atas ke bawah. Nizam khilafat adalah lanjutan dari nizam nubuwah, sedangkan syariat adalah hukum yang permanen.²⁷ Dengan kata lain, sistem khilafat yang diterapkan selama ini menurut JAI bersifat *wad'un ilahiyyun*. Walaupun dalam prakteknya tidak sepenuhnya bersifat demikian. Karena dari khalifah II sampai khalifah V merupakan keturunan Mirza Ghulam Ahmad. Itu menunjukkan sistem monarki juga berselimit dalam kekhilafahan JAI.

Kedudukan khalifah dalam JAI memiliki otoritas penuh terhadap segala urusan agama dan kelembagaan.²⁸ Khalifah memiliki hak mengatur dan menerbitkan semua urusan jamaah. Sebab itu, secara esensial khalifah tidak harus menjadi kepala negara.²⁹ Di dalam konteks bernegara, JAI mentaati semua peraturan dan Undang-Undang yang berlaku. Dengan catatan tidak bertentangan dengan apa yang telah difatwakan oleh khalifah. Prinsip *sam'an wa ta'atan* sangat dipegang teguh semua JAI.

Hadis yang sering digunakan sebagai landasan khilafah JAI salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan imam Ahmad ibn Hanbal, redaksi hadisnya sebagai berikut.

فقد روى الإمام أحمد عن النعمان بن بشير رضي الله عنه الله، قال: كنا جلوساً في المسجد فجاء أبو ثعلبة الخشني فقال: يا بشير بن سعد أتخفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمراء، فقال حذيفة: أنا أحفظ خطبته. فجلس أبو ثعلبة. فقال حذيفة: قال رسول الله صلى الله عليه

²⁵ Abdul Rozzaq, "Khilafat Islam Tinjauan Aspek Nubuwan dan Manifestasinya" *Makalah Seminar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2015 (tidak dipublikasikan), hlm. 5.

²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Nanang Sanusi, 22 Mei 2015, di kediamannya.

²⁷ Saleh A. Nahdi, *Khilafat Sarana Pemersatu Umat* (Bogor: Yayasan Wisma Damai, 1992) hlm. 19.

²⁸ Ahmad Najib Burhani, "Khilafah Ahmadiyah sebagai Satu Model Penerapan Sistem Kekhilafahan di Era Kontemporer," dalam Komaruddin Hidayat (ed.), *Kontroversi Khilafah: Islam, Negara dan Pancasila* (Bandung: Mizan, 2014), hlm. 123.

²⁹ Inayah Rochmaniyah, "Imamah-Khilafah" dalam M. Nur Kholis Setiawan dan Djaka Soetapa (ed.), *Meniti Kalam Kerukunan*, hlm. 120. Bandingkan dengan Saleh A. Nahdi, *Khilafat Sarana Pemersatu*, hlm. 19.

وسلمتكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكاً عاضاً فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكاً جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت

Artinya:

“...Dari Nu'man bin Basyir berkata: Suatu saat kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW, dan Basyir adalah orang yang dapat menahan perkataan. Maka datang Abū Sa'labah Al-Khasyani dan berkata:”Wahai Basyir bin Sa'd apakah engkau hafal tentang hadits Rasulullah SAW pada masalah kepemimpinan. Berkata Huzaifah:” Saya hafal ungkapanannya. Maka duduklah Abū Sa'labah, maka Huzaifah berkata: Rasulullah SAW bersabda:” Akan ada kenabian pada kamu selama dikehendaki Allah supaya ada. Kemudian Allah mengangkatnya. Kemudian akan ada khilafat atas pola kenabian selama dikehendaki Allah supaya ada. Kemudian Allah mengangkatnya. Kemudian akan ada kerajaan absolut dan itu akan ada selama dikehendaki Allah supaya ada. Kemudian Allah akan mengangkatnya. Kemudian akan ada kerajaan absolut dan ia akan ada selama dikehendaki Allah supaya ada. Kemudian Allah mengangkatnya. Kemudian akan ada khilafat dengan pola kenabian. Kemudian beliau berdiam diri. (HR. Ahmad dan Baihaqi)

Menurut hadis di atas ada empat era dalam perkembangan Islam. dan era keempat adalah yang merupakan zaman Isa dan Mahdi, yang telah dibawakan oleh Mirza Ghulam Ahmad. Empat era yang tertera dalam hadis itu yaitu 1) era Rasulullah saw; 2) era *khulafa rasyidin*; 3) era kerajaan-kerajaan; 4) era nubuwat dan khilafat. Berdasarkan al-Qur'an dan hadis yang telah disebutkan, bagi JAI, Mirza Ghulam Ahmad adalah khalifah di akhir zaman, dan kekhalifahan itu akan berlaku hingga kiamat. Tidak akan ada lagi mujadid di luar khilafat Mirza Ghulam Ahmad.³⁰

Menurut pemahaman JAI hadis di atas sudah terbukti dalam sejarah Islam. Setelah Rasulullah wafat tonggak kepemimpinan beralih di tangan Abū Bakar, 'Umar, Usman dan Alī. Setelah itu muncul khalifah dalam kerajaan Mua'wiyah, yang berakhir pada kesultanan Abdul Hamid II di Turki (1909

³⁰Di dalam kitab Misykat di bawah kalimat summa takunu khilafah 'ala minhaj an-nubuwwah terdapat keterangan sebagai berikut, “sudah jelas bahwa khilafah yang dimaksud di sini ialah (yang berlaku) di zaman (khilafah) Isa dan Imam Mahdi. Baca M. Ahmad Cheema, *Khilafat Telah Berdiri*, hlm. 5-9.

M). Sesudah itu, akan muncul kembali khilafat dengan pola kenabian dengan pola kenabian kedua dalam masa Isa dan Mahdi.³¹

Konsep khilafah seperti yang diterapkan JAI ini banyak yang mengkritik. Salah satunya, Philip K. Hitti yang berpandangan bahwa khilafah seperti yang dipegang JAI dianggap sebagai pemahaman yang keliru. Menurutnya, pernyataan khilafah hanya sebagai institusi keagamaan dan mengurus masalah rohani merupakan hasil analogi salah kaprah terhadap kekuasaan duniawi dan kekuasaan keagamaan.³² Padahal, dalam sejarah Islam, khilafah itu tidak hanya mengurus aspek keagamaan (spiritual) semata melainkan juga tatanan sosial dan politik. Sejarah menyebutkan, Nabi diakui sebagai suara otoritatif yang mewakili kehendak Tuhan. Ia dipandang sebagai penerima wahyu Tuhan, sehingga secara efektif berperan sebagai pemegang otoritas dalam masyarakat muslim paling awal.³³ Kendati demikian, makna khilafah ternyata beragam. Khilafah tidak hanya dimaknai sebagai sistem negara yang berbalut simbol-simbol agama. Melainkan juga dimaknai sebagai sistem keagamaan yang bersifat ukhrowi atau spiritual.

C. Persinggungan Khilafah(Spiritual) dan *Nation State*

Periode kesultanan telah menandai permulaan yang baru dan cukup berbeda setelah kejatuhan Baghdad dan berakhirnya khilafah di Turki Utsmani. Perpecahan politik serta kemerosotan sosial dan moral memang mencengkeram banyak bagian dunia Muslim. Kerusakan internal masyarakat Muslim diperparah oleh ancaman yang terus yang meningkat dari kehadiran Eropa dan siasat kaum imperialis.³⁴

Kekalahan umat Islam 1000 tahun terakhir yang terus mengalami kemerosotan mendorong JAI merasa perlu menegakkan khilafah dalam Islam. Dengan khilafah umat Islam akan kemajuan umat Islam akan kembali.³⁵

JAI menyadari, setelah kekhilafahan Islam yang berpusat di Turki hancur, para raja dan penguasa negara-negara Islam berebut pengaruh agar diakui sebagai khalifah. Namun ambisi itu justru menenggelamkan sistem kekhilafahan dalam Islam sendiri. sebab itu, Ahmadiyah menganggap justru para penguasa yang memiliki tendensi politis tersebut telah melakukan pengkhianatan terhadap Islam. Sebab itu, khilafah yang diusung JAI berpijak

³¹ Iskandar Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah*, hlm. 121-122.

³² Philip K. Hitti, *History of The Arab*, terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005), hlm. 230.

³³ Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, terj. R. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: Serambi, 2004), hlm. 26.

³⁴ John L. Esposito, *Islam Warna-Warni: Ragam Ekspresi Menuju "Jalan Lurus"*, terj. Arif Maftuhin (Jakarta: Paramadina, 1991) hlm. 144.

³⁵ Muhammad Solikhin, *Kontroversi Ahmadiyah: Fakta, Sejarah, Gerakan dan Aqidah Jemaat Ahmadiyah Indonesia* (Yogyakarta: Garudhawaca, 2013), hlm. 53.

pada pembinaan spiritual umat. Konsepnya lebih pada historisme-teologi, yakni sistem khilafah yang dibangun merepresentasikan kembali *khulafā' rasyidīn*.³⁶ Pada sisi lain, sistem khilafah JAI tidak bisa dilepaskan dari unsur politis yang bernuansa pada kekuasaan tetapi bersifat lebih lunak (*soft*).

Karena JAI membedakan tugas Nabi (khalifah) dan pemimpin negara (*'umara*), tugas seorang Nabi adalah memimpin umat dalam urusan agama atau ruhani. Agar umat mengenal Tuhannya dan dengan hati tulus mencintai dan beribadah kepada-Nya. Ini berdasarkan surat al-Anbiya ayat 26. Adapun tugas kepala negara (raja) adalah mengatur umatnya dalam urusan kenegaraan agar mereka hidup aman dan sejahtera dengan menunaikan amanat yang dipercayakan rakyatnya dengan jujur dan adil. Ini berdasarkan surat an-Nisa: 59.³⁷

Bahkan, Nanang Sanusi mengatakan, Islam tidak berkepentingan pada sebuah negara. Kepentingan Islam itu adalah *kaffatan linnas*. Kepentingan Islam itu bukan pada sebuah teritorial yang ditentukan oleh batas-batas negara.³⁸ Akan tetapi, hal itu yang membedakan konsep khilafah dengan konsep *nation state*. Sistem *nation state* adalah sebuah sistem politik kenegaraan yang lebih berdasarkan pada kesamaan bangsa bukan berdasarkan kesamaan agama. Sistem *nation state* juga ditandai dengan adanya batas geografis dan teritorial. Ini yang membedakan dengan sistem khilafah yang tidak mengenal batas-batas geografis dan teritorial.³⁹ Walaupun demikian, Islam berkepentingan mengawal pemerintah, agar tujuan dari didirikannya sebuah negara tetap pada *core*-nya.

Nanang Sanusi menambahkan, untuk mewujudkan tegaknya syariah bukan dari politik melainkan dengan keimanan. Sebab itu, ketika ditanya mengenai permasalahan bangsa yang terjadi sekarang, seperti korupsi, ketidakadilan hukum, kemiskinan dan radikalisme agama, pria berkacamata ini menjawab, “yang dituju oleh Islam sejak awal itu orangnya bukan negara. Syariat itu bisa tegak dalam setiap orang”.⁴⁰ Konsep konsep khilafah sebagai kepemimpinan spiritual (rohani) sebetulnya tidak hanya dimiliki JAI saja, Jauh sebelum JAI lahir model seperti itu sudah berjalan lama dalam dunia tarekat (*tariqah*).

Suami dari Mira Tsuraya Basalamah ini menambahkan, kekhalifahan dalam JAI adalah kekhalifahan murni spiritual (rohani) yang menjalankan semata-mata misi untuk sesuai dengan yang diharapkan oleh Islam, sebagaimana terukir dalam surat aṣ-Ṣaff ayat 9. Oleh karena itu JAI tidak ambil pusing dengan kewarganegaraan dan *nation state*. Sehingga dalam bingkai

³⁶Muhammad Solikhin, *Kontroversi Ahmadiyah*, hlm. 55-57.

³⁷Abdul Rozzaq, “Khilafat Islam Tinjauan, hlm. 2-3.

³⁸Hasil wawancara dengan Bapak Nanang Sanusi, 22 Mei 2015, di kediamannya.

³⁹Saifuddin, *Khilafah vis-a-vis Nation State*, hlm. 3.

⁴⁰Hasil wawancara dengan Bapak Nanang Sanusi, 22 Mei 2015, di kediamannya.

Jemaat Ahmadiyah, bisa tinggal di mana saja.⁴¹ Dengan demikian, JAI tidak mempermasalahkan sistem negara yang berjalan, entah itu demokrasi liberal, demokrasi pancasila atau yang lainnya, yang terpenting Negara bisa menjamin hak-hak semua warganya.

Padahal syariaah samawi turun dengan jaminan Tuhan bagi manusia, yaitu untuk menentukan sasaran keberadaan syariat samawi tersebut di dunia dan metode yang menjamin terciptanya sasaran itu. Islam adalah resume dari semua agama, datang untuk menjelaskan kepada manusia secara detail tujuan keberadaannya, menjadikan Allah sebagai kiblat mereka dan mencari ridhanya, berusaha dalam melaksanakan perintah-Nya.⁴² Sebab itu, substansi dari syariaah itu bukan hanya menyangkut ibadah dan spiritual melainkan juga masalah tatanan sosial, kebudayaan dan politik kenegaraan. Nilai-nilai substantif dalam syariaah itu yang mestinya diperjuangkan dalam membangun sebuah *nation state*, bukan cangkangnya.

Habermas berpendapat, konsep *nation state* muncul dalam konteks reaksional atas krisis legitimasi dan integrasi yang muncul. Setelah masa perang antaragama dan lahirnya masyarakat majemuk, otoritas politis harus menyandarkan legitimasinya dengan argumentasi yang rasional.⁴³ Benedict Anderson mendefinisikan *nation state* sebagai komunitas politis dan dibayangkan sebagai sesuatu yang bersifat terbatas secara inheren sekaligus berkedaulatan.⁴⁴ Adapun John Hutchison, sebagaimana dikutip Yudi Latif, mengungkapkan bahwa konsep *nation state* menekankan lima aspek utama dalam formasi kebangsaan, antara lain, yaitu: 1) unit politik sekuler, yang dijiwai oleh gagasan tentang kedaulatan rakyat, yang mencari perwujudannya dalam kehadiran negara independen, dipersatukan oleh hak-hak kewargaan yang universal; 2) teritorial yang terkonsolidasikan, yang memperlihatkan skala baru organisasi yang diusung oleh negara birokrasi dan ekonomi pasar yang telah memudahkan kesetiaan lokal dan regional serta melahirkan jaringan komunikasi yang lebih intensif; 3) secara etnis lebih homogen dibandingkan dengan masyarakat polietnis sebelumnya.⁴⁵

Dalam merespon konsep *nation state* ini, umat Islam memang terpecah ke dalam dua model pemikiran. *Pertama*, respon konformis, yaitu menerima konsep *nation state* sebagai suatu proses yang dialami dan harus ditempuh

⁴¹Hasil wawancara dengan bapak Nanang Sanusi, 22 Mei 2015, di kediamannya.

⁴²Abdul Majid an-Najjar, *Khilafah; Tinjauan Wahyu dan Akal*, terj. Forum Komunikasi al-Ummah (Jakarta: Gema Insani Press, 1999) hlm. 31.

⁴³Sebagaimana dikutip Reza A.A. Wattimena, *Melampaui Negara Hukum Klasik* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 177.

⁴⁴Benedict Anderson, *Imagined Community: Komunitas-Komunitas Terbayang*, terj. Omi Intan Naomi (Yogyakarta: Insist, 2001), hlm. 8.

⁴⁵Baca, Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualisasi Pancasila* (Jakarta: Gramedia, 2011) hlm. 361.

untuk membentuk identitas nasional dan memberikan loyalitas politik nasional. *Kedua*, respon non-konformis, yaitu menolak sebagian atau keseluruhan konsep nation state. Biasanya model ini mengajukan konsep negara agama untuk menggantikan tawaran konsep nation state, seperti khilafah yang diusung salah satu ormas di Indonesia.⁴⁶ Seperti halnya Nahdlatul Ulama, dalam kategori itu, JAI masuk kategori yang pertama. Yakni dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) khilafah JAI yang mengedepankan unsur spiritualitas dan moralitas itu tidak bertolak belakang dengan bangsa dan negara Indonesia.

Di dalam hal itu tidak ada kepentingan yang bertabrakan antara kekhilafahan JAI dengan NKRI. Sebab itu, JAI tidak bersinggungan dengan negara dalam bentuk apapun karena khilafah yang diusungnyamurni adalah spiritual (rohani).⁴⁷ Berdasarkan pembagian tugas antara Nabi (Rasul) dan Kepala Negara tersebut, maka kepemimpinan nasional dan khilafat Islamiyah tidak saling bertentangan. Keduanya justru bersinergi karena khilafat Islamiyah itu hanya pelayan untuk meneruskan tugas-tugas Nabi Muhammad saw dalam urusan keruhanian atau agama. Adapun kepemimpinan nasional mengatur kehidupan duniawi umat agar hak-haknya dapat terpenuhi.⁴⁸

Apabila Khilafah JAI itu bermakna spiritual (rohani) dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, maka akan menjadi salah satu penopang tegaknya NKRI ke depan. Jauh sebelum Muhammad Ali menginjakkan kakinya di Aceh, para kiai di Indonesia, misalnya KH. Hasyim Asy'ari, sudah memperjuangkan dan membangun NKRI dengan nilai-nilai keislaman yang khas dengan kekayaan budaya di Nusantara. Khilafah yang dimaknai sebagai kepemimpinan spiritual (rohani) bisa menjadi ruh dalam membentuk masyarakat dalam meningkatkan spiritualitas dan moralitas.

D. Implementasi Khilafah dalam Aktivitas Masyarakat JAI

Dalam praktek sehari-hari, khalifah itu tingkatan tertinggi pemimpin JAI di seluruh dunia. Di bawahnya ada amir-amir yang membawahi JAI di setiap negara. Kemudian yang paling bawah atau lingkup yang paling kecil adalah Ketua Cabang JAI. Ketua ini yang paling bertanggung jawab dalam memimpin, memprogram, membimbing dan sebagainya sebuah komunitas

⁴⁶Mengajukan konsep khilafah di era modern yang didominasi oleh sistem nation state dan paham demokrasi liberal tentu menjadi sesuatu yang aneh karena seakan-akan menentang arus yang mainstream dan dianggap utopis. Baca Saifuddin, *Khilafah vis-a-vis Nation State*, hlm. 3-4.

⁴⁷Hasil wawancara dengan Bapak Nanang Sanusi, Jum'at, 22 Mei 2015, di kediamannya.

⁴⁸Abdul Rozzaq, "Khilafat Islam Tinjauan, hlm. 3.

dalam lingkup sebuah cabang. Ketua adalah representasi dari khalifah dalam lingkup cabang.⁴⁹

Interaksi sosial antara JAI di Gondrong dan *ghair* JAI terlihat rukun. Masyarakat Gondrong saling membaur antara JAI maupun non-JAI. Bahkan, menurut Romdoni, di antara mereka masih memiliki ikatan saudara, sehingga komunikasi yang terbangun juga tetap berjalan seperti biasa.⁵⁰ Bahkan, di antara JAI ada yang terlibat dalam struktur pemerintahan Rukun Warga setempat. Setengah dari ketua RT yang ada di Gondrong merupakan orang JAI. “Walaupun dalam agama ada sedikit perbedaan, tetapi secara sosial kita tetap hubungan baik,” tutur Jamhuri.⁵¹

Internalisasi nilai-nilai kekhilafahan dalam kehidupan para anggota JAI dilakukan dengan berbagai bentuk. Salah satunya, setiap Jum'at malam (sabtu), tepatnya sekitar pukul 7 malam, mereka antusias mendengarkan khutbah khalifah di India secara live melalui Moslem Television Ahmadi (MTA), yang merupakan stasiun televisi resmi JAI secara internasional.⁵² Gerakan khilafah Ahmadiyah memang pada aspek rohani dan moral. Setiap jemaat Ahmadi diharuskan untuk melakukan shalat malam secara berjamaah di Masjid Mahmudah. Itu juga mereka terapkan kepada anak-anak sebagai latihan. Setiap malam minggu, anak-anak (sekitar usia 7-15 tahun) berkumpul di Masjid dengan disertai pendamping. Mereka tidur di Masjid, dan ikut melaksanakan shalat malam secara berjamaah.

Khalifah memiliki hak secara penuh dalam menentukan kegiatan, ibadah⁵³ dan program kerja organisasi JAI di wilayah maupun cabang. Semua keseharian warga JAI sesuai dengan aturan yang dikeluarkan khalifah.⁵⁴ Ketua Cabang JAI Gondrong Margani menjelaskan, setiap tahun pengurus pusat

⁴⁹Hasil wawancara dengan Bapak Margani, 23 Mei 2015, di Masjid Mahmudah.

⁵⁰Hasil wawancara dengan Bapak Romdoni, 23 Mei 2015, di kediamannya. Begitu juga dengan penuturan Jamhuri, sebetulnya warga non JAI di sekitar Gondrong menerima saja keberadaan mereka. Namun terkadang ada provokasi-provokasi dari luar sehingga menimbulkan konflik sosial. JAI Gondrong sering ikut bergabung dengan kegiatan masyarakat seperti kerja bakti. Hasil wawancara dengan Bapak Jamhuri, 23 Mei 2015, di kediamannya

⁵¹Hasil wawancara dengan Bapak Jamhuri, 23 Mei 2015, di kediamannya.

⁵²Hasil Wawancara dengan Bapak Margani, 23 Mei 2015, di Masjid Mahmudah.

⁵³Hasil wawancara dengan Bapak Margani, 23 Mei 2015, di Masjid Mahmudah.

⁵⁴Nanang Sanusi mengatakan, segala sesuatu yang hendak dilakukan JAI atas sepengetahuan khalifah. Dan setiap anggota ada di bawah pengawasan khalifah. Khalifah memastikan semua anggotanya mengamalkan agama dan aktif dalam segala kegiatan dan pengorbanan. Sikap ahmadiyah terkait mazhab, semuanya dianggap sah. “Tetapi dalam pengamalan kita menetapkan sebuah keseragaman seluruh yang diterapkan dalam Jemaat ini. Ukuran keseragaman itu tentu saja figur khalifah. Bagaimana khalifah melaksanakan shalat,” tegasnya. Hasil Wawancara dengan Bapak Nanang Sanusi, 22 Mei 2015, di kediamannya.

mengadakan musyawarah. Salah satu agenda musyawarah itu adalah memilih program kerja yang telah diajukan dari setiap cabang. Hasil yang dimusyawarahkan di tingkat nasional itu atas restu khalifah.⁵⁵ Sistem satu arah dan satu komando seperti ini yang dipegang JAI ini mudah ditunggangi kepentingan politik. Walaupun menurut JAI seorang khalifah sebagai orang “ma’sum”, sehingga khalifah tidak mungkin membawa umatnya dalam kesengsaraan dan kesesatan.

E. Simpulan

Perbedaan penafsiran dalam beberapa konsep-konsep dalam agama berimplikasi pada model keagamaan seseorang maupun kelompok. JAI sebagai salah satu organisasi yang sudah lama berada di Indonesia juga demikian. Sebab itu, JAI sebagai minoritas terkadang dianggap “keluar” dari Islam mainstream. Konsep Kenabian dan kedatangan Isa al-Masih dan Imam Mahdi adalah letak dasar perbedaannya, dari situ kemudian berimplikasi pada pola keagamaan, struktur dalam organisasi dan tata cara beribadah.

Khilafah juga menjadi isu yang ditawarkan JAI secara berbeda. Pasca meletusnya Perang Dunia I wacana khilafah menjadi trending topic pada saat itu. Mengingat, kekhalifahan Turki Utsmani sudah mulai rapuh, bahkan pada tahun 1924 dihilangkan dari muka bumi. Salah satu golongan yang hingga saat ini masih menerapkan khilafah adalah JAI. Namun sistem khilafah yang sudah diterapkan lebih dari 100 tahun ini tidak berorientasi pada ranah politik kenegaraan, sebagaimana organisasi Islam lainnya yang mengusung tema serupa. khilafah yang diusung JAI ditekankan pada aspek spiritual atau rohani. Khilafah adalah sebagai kepemimpinan rohani bukan kepemimpinan politik yang berorientasi pada kekuasaan. Dalam konteks itu, sistem kekhalifahan ini bisa disamakan dengan tingkatan kepemimpinan tarekat (*tariqah*) dalam Islam. Dan tarekat sudah ada jauh sebelum JAI lahir.

Berdasarkan penelitian, makna khilafah itu tidak tunggal. Khilafah tidak harus dimaknai sebagai sebuah sistem yang menjalankan negara dengan simbol-simbol agama. Khilafah juga bisa dimaknai sebagai kepemimpinan non politis, yang m pada wilayah spiritual (rohani). Kepentingan khilafah adalah untuk membentuk manusia yang beriman dan berkarakter. Pengertian itu dalam konteks *nation state*, terutama NKRI, bisa berjalan secara akomodatif selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Dengan demikian, kekhalifahan JAI yang dimaknai kepemimpinan spiritual itu bisa menjadi salah satu modal untuk mempertahankan eksistensi NKRI. Model itu juga dapat menghiasi wajah Islam dan menjadi penting untuk ikut membangun Islam di Indonesia, tepatnya Islam Nusantara. Agar semua elemen bersama-sama memajukan Indonesia masa depan.

⁵⁵Hasil wawancara dengan Bapak Margani, 23 Mei 2015, di Masjid Mahmudah.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Hazrat Mirza Ghulam. *Ajaranku*. Parung: Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 2002.
- Amin, Ainur Rofiq al-. *Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 2012.
- Anderson, Benedict. *Imagined Community: Komunitas-Komunitas Terbayang*, terj. Omi Intan Naomi. Yogyakarta: Insist, 2001.
- Cheema, M. Ahmad. *Khilafat Telah Berdiri*. Ttp: Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 1995.
- Esposito, John L. *Islam Warna-Warni: Ragam Ekspresi Menuju "Jalan Lurus"*, terj. Arif Maftuhin. Jakarta: Paramadina, 1991.
- Fadl, Khaled M. Abou El. *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, terj. R. Cecep Lukman Yasin. Jakarta: Serambi, 2004.
- Hidayat (ed.), Komaruddin. *Kontroversi Khilafah: Islam, Negara dan Pancasila*. Bandung: Mizan, 2014.
- Hitti, Philip K. *History of The Arab*, terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005.
- Hudori, Ahmad. "Khilafah Islamiyah Perspektif Ahmadiyah", *Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2009 (tidak dipublikasikan).
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualisasi Pancasila*. Jakarta: Gramedia, 2011.
- Nahdi, Saleh A. *Khilafat Sarana Pemersatu Umat*. Bogor: Yayasan Wisma Damai, 1992.
- Najjar, Abdul Majid an-. *Khilafah; Tinjauan Wahyu dan Akal*, terj. Forum Komunikasi al-Ummah. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Nugroho, Agus Cahyo. "Gerakan Khilafat di India Tahun 1919-1924", *Skripsi Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2008 (tidak dipublikasikan).
- Rozzaq, Abdul. "Khilafat Islam Tinjauan Aspek Nubuwat dan Manifestasinya" *Makalah Seminar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2015 (tidak dipublikasikan).
- Rumadidan Ahmad Suaedy (ed.), *Politikasi Agama dan Konflik Komunal: Beberapa Isu Penting di Indonesia*. Jakarta: The Wahid Institute, 2007.
- Saifuddin, *Khilafah vis-a-vis Nation State Telaah atas Pemikiran Politik HTI*. Yogyakarta: Mahameru, 2012.
- Setiawandan Djaka Soetapa (ed.), M. Nur Kholis. *Meniti Kalam Kerukunan: Beberapa Istilah Kunci dalam Islam dan Kristen*. Jakarta: Gunung Mulia, 2010.

- Sodik, Mochamad. “Mengenal Jemaat Ahmadiyah Lebih Dekat: Teks, Konteks dan Pengalaman Lapangan” *Bahan Diskusi Short Research dan Seminar Hasil Penelitian*, ISAI's UIN Sunan Kalijaga, 17 Mei 2015 (tidak dipublikasikan)
- Solikhin, Muhammad. *Kontroversi Ahmadiyah: Fakta, Sejarah, Gerakan dan Aqidah Jemaat Ahmadiyah Indonesia*. Yogyakarta: Garudhawaca, 2013.
- Wattimena, Reza A.A. *Melampaui Negara Hukum Klasik*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Wawancara dengan Bapak Jamhuri, 23 Mei 2015, di kediamannya.
- Wawancara dengan Bapak Margani, 23 Mei 2015, di Masjid Mahmudah.
- Wawancara dengan Bapak Nanang Sanusi, 22 Mei 2015, di kediamannya.
- Wawancara dengan Bapak Romdoni, 23 Mei 2015, di kediamannya.
- Wijaya, Aksin. “Negara Islam Indonesia? (Menguji Otentisitas Argumen Hukum Khilafah Islamiah dalam Konteks Berislām Indonesia)”, *Conference Proceedings Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XII)* IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008 (tidak dipublikasikan).
- Zulkarnain, Iskandar. *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 2005.